

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Kebudayaan Indonesia pada hakikatnya merupakan keanekaragaman kekayaan budaya bangsa yang menjadi landasan pengembangan bangsa yang memiliki nilai-nilai budaya. Kebudayaan Indonesia merupakan bentuk utuh dari berbagai kumpulan berbagai keanekaragaman budaya-budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke diseluruh Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa yang harus dibina, dijaga, dan dilestarikan untuk kelangsungan kualitas kehidupan yang memperkuat kepribadian bangsa dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan.

Bangsa Indonesia dilandasi nilai luhur bangsa berdasarkan Pancasila memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika dan berwawasan nusantara dan berkebangsaan. Pelaksanaan yang terkandung dari makna kebhinekaan serta berwawasan nusantara dan berkebangsaan, harus diupayakan sehingga senantiasa mampu menerima perbedaan budaya, agama, serta perilaku masyarakat dimana pelaksanaan pembagunan mampu membangkitkan sikap kesetiakawanan dan tanggung jawab sosial dan disiplin serta masyarakat pantang menyerah. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bukan hanya sekedar hidup ketertiban dan keamanan ataupun sekedar hidup rukun dan damai tanpa adanya konflik, melainkan persatuan dan kesatuan yang dimaksud memiliki makna adanya konflik dan perbedaan serta menerima semua itu sebagai realita sosial yang terjadi. Sebagai negara kepulauan, Indonesia terdiri dari beribu banyaknya pulau besar dan pulau kecil yang tersebar secara merata diseluruh penjuru Nusantara.

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk di mana hal ini ditunjukkan dengan banyaknya suku, agama, adat istiadat, bahasa, dan ras etnik. Letak geografis yang strategis dan sumber daya alam yang melimpah membuat

bangsa Indonesia di satu sisi lain memiliki potensi disintegrasi. Kemajemukan ini adalah realitas yang tak mungkin dihindari atau ditutupi, bagi bangsa Indonesia kemajemukan tersebut memiliki tingkat kepekaan yang tinggi di mana hal ini memicu terjadinya konflik etnis kultural. Globalisasi dan perkembangan jaman juga menjadi potensi terjadinya suatu disintegrasi, adanya suatu globalisasi membuat berbagai nilai dan budaya sedikit banyak memiliki perubahan makna yang mengundang pro dan kontra yang terjadi di lapisan masyarakat. Secara umum Indonesia termasuk negara kepulauan dan negara maritim. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, batas wilayah Indonesia sendiri berbatasan dengan beberapa negara seperti Malaysia, Australia, dan Papua Nugini. Letak Indonesia secara geografis berada pada posisi silang yaitu diantara 2(dua) benua dan 2(dua) samudera, benua yang mengapit wilayah Indonesia adalah Benua Asia dan Benua Australia, sedangkan samudera yang mengapit wilayah Indonesia adalah Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia dilalui garis khatulistiwa, letak astronomis Indonesia berada pada 6 LU- 11 LS dan 95 BT-141BT, hal ini menyebabkan tiga pembagian waktu yang ada di Indonesia. Berdasarkan geografis Indonesia terdapat beberapa pengaruh dan karakteristik yang dihasilkan.

Papua adalah provinsi yang terletak di bagian paling timur milik Indonesia. Belahan timur lainnya merupakan negara Papua Nugini. Provinsi Papua memiliki luas sekitar 312.224,37 km, Papua memiliki potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis dan strategis. Kabupaten Puncak Jaya merupakan kota tertinggi di pulau Papua, sedangkan kota terendah adalah kota Merauke. Kabupaten Merauke merupakan salah satu dari 29 Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Papua Selatan yang memiliki wilayah terluas diantara kabupaten / kota di Provinsi Papua. Secara geografis letak Kabupaten Merauke berada antara 137°- 141°BT dan 6°00 - 9° LS, luas kabupaten Merauke 45.071km². Sebagian wilayah Merauke terdiri dari daratan dan berawa, umumnya berdaratan rendah. Kabupaten Merauke terletak paling timur wilayah nusantara dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi
- Sebelah Timur : Negara Papua New Guinea
- Sebelah Selatan : Laut Arafura
- Sebelah Barat : Laut Arafura

Kondisi alam Merauke memang sedikit berbeda dengan kondisi alam Papua secara umum, kondisi alam Merauke tidak jauh berbeda dengan Australia Utara. Suku Marind Anim merupakan suku terbesar yang di Merauke, suku ini mendiami Selat Muli hingga di perbatasan Papu dan Papua Nugini. Di dataran Merauke, suku Marind Anim mendiami aliran sungai Burak, Bian, Eli, Kumbe, dan Maro. Secara administrasi suku Marind Anim masuk ke dalam zona distrik Okaba, Merauke, Kimam, dan Muting. Sosial budaya suku Marind Anim menganut konsep patrilineal, yaitu ikatan teritorial eksogamik totemisme.

Pada aspek pertahanan keamanan, melihat dari letak geografis Indonesia yang begitu luas dan memiliki keanekaragaman budaya yang tersebar di seluruh Nusantara, kemampuan aparat baik militer maupun polisi bekerja secara profesional untuk menjaga pertahanan dan keamanan nasional, meskipun soal pertahanan dan keamanan sebenarnya bukan tanggung jawab aparat negara saja melainkan juga menjadi tanggung jawab dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan pasal 30 UUD 1945. Sedangkan untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia militer Indonesia yang disebut TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang tersebar di seluruh nusantara yang meliputi TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Tugas pokok dan fungsi TNI sendiri adalah mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara, di mana segala bentuk ancaman yang mempengaruhi keutuhan dan tatanan kedaulatan negara yang tidak harus berupa perang dan kekerasan fisik tapi juga ancaman – ancaman yang bersumber pada bidang sosial, ekonomi, politik dan juga budaya. TNI bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang dianggap membahayakan maupun dalam bentuk nyata maupun tersamar. Oleh karena itu sekarang reformasi TNI selain kembali di jati diri asal mempertahankan kedaulatan negara dan juga membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan di luar kemiliteran. TNI tetap menjadi simbol integritas nasional.

Korps Marinir Republik Indonesia (Kormar RI) adalah sebuah unit tentara Nasional Indonesia yang menyelenggarakan operasi amfibi, pertahanan pantai, pengamanan pulau terluar dan pembinaan potensi maritim. Kormar RI memiliki kedudukan sebagai komando utama operasi TNI dan komando utama pembinaan pada markas besar TNI Angkatan Laut. Pasukan Marinir 3 atau Pasmar 3 merupakan Komando Pelaksana Utama Korps Marinir yang meliputi wilayah timur Indonesia, Pasmar 3 berkedudukan di Klabim, Sorong. Di wilayah timur tersebar di titik perbatasan Batalyon Pertahanan Marinir untuk menjaga kedaulatan negara, salah satunya Batalyon Pangkalan Pertahanan XI yang berada di Kabupaten Merauke.

Batalyon Pangkalan Pertahanan XI atau yang biasa di sebut dengan Yonmarhanlan XI Merauke bertugas untuk menjaga kedaulatan NKRI, potensi maritim, dan juga ketahanan pangan dan wilayah untuk daerah teritorial Merauke di mana penduduknya tersebar luas dan rawan dengan konflik SARA, perbedaan ideologi, Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pembinaan teritorial yang diemban oleh TNI AL khususnya Marinir berdasarkan Binaan Potensi Maritim atau biasa disebut BINPOTMAR, merupakan suatu bentuk implementasi dalam memberdayakan potensi pembinaan nasional maritim yang mengacu pada pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan mempertahankan kedaulatan negara terutama wilayah yang berbatasan dengan negara – negara lain yang menjadi *cross border* wilayah Indonesia.

Pembangunan wilayah dilakukan secara merata bukan hanya terpusat di wilayah – wilayah pusat saja akan tetapi pembangunan nasional dilakukan secara nyata dan terpadu di wilayah Papua secara umum khususnya juga dilakukan di Kabupaten Merauke. Papua memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan kaya, akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan di bumi Cendrawasih tersebut tidak mudah. Sumber daya manusia (SDM), sosial budaya, konflik – konflik yang timbul karena adanya perbedaan ideologi, kurangnya wawasan dan pengetahuan dan rasa cinta tanah air menjadi faktor utama penentu keberhasilan pembangunan nasional. Konflik – konflik yang terjadi di tanah Papua khususnya

di Kabupaten Merauke juga di sebabkan karena adanya perbedaan ideologi yang terjadi secara merata di seluruh tanah Papua yang di sebabkan oleh OPM yang menuntut adanya referendrum pemisahan Papua untuk lepas dari Indonesia. Berbagai pemberontakan yang terjadi mulai dari penyebaran isu – isu hoax yang mengandung SARA dan ujaran kebencian tentang pemerintahan Indonesia yang gagal total merangkul kesejahteraan untuk masyarakat Papua.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) memicu konflik tidak hanya dengan TNI – POLRI tetapi juga dengan masyarakat sipil. Teror yang disebarkan mulai dari tindakan kriminal pembunuhan, pemalakkan masyarakat umum, demonstrasi terhadap pemerintahan daerah dengan membawa senjata tradisional di fasilitas umum hingga pengibaran bendera OPM setiap pada tanggal 1 Desember dan memicu kebencian masyarakat asli Papua yang biasa disebut OAP kepada warga pendatang khususnya TNI yang bertugas di wilayah tersebut. Berdasarkan data BBC News Indonesia yang di posting di Youtube juru bicara komando nasional TPNPB – OPM, Seby Sambom membacakan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo berisi penolakan menuruti seruan pemerintah Indonesia untuk menyerah dan memulai dialog, “ TPNBP – OPM tidak akan menyerah dengan alasan apapun sebelum kemerdekaan bangsa Papua terwujud dari penjajahan Indonesia., perang tidak akan berhenti sebelum tuntutan TPNPB – OPM dilakukan oleh pemerintahan Indonesia.” Militasi kelompok ini diyakini oleh peneliti kajian Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang menyebutkan bahwa organisasi sayap militer OPM merupakan kelompok yang paling agresif, dan yang menjadi sasaran utama mereka adalah TNI dan merembet ke masyarakat pendatang. OPM sebagian besar bermarkas di Papua dan tersebar hingga ke Merauke, pedalaman Papua, dan di perbatasan Papua Nugini. Konflik yang semakin meningkat bukan hanya dalam bentuk fisik yang sudah memakan korban baik anggota TNI maupun masyarakat sipil khususnya warga pendatang bukan asli OAP da penyebaran informasi hoax ini menimbulkan keresahan dan dampak yang tidak baik untuk masyarakat yang berada di Kabupaten Merauke secara

khusus dan secara umum pada pembangunan nasional, serta mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI.

Sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan Binpotmar yang tidak hanya dilakukan oleh TNI AL melainkan juga Marinir yang berada dalam naungan TNI AL sebagai pasukan garda terdepan maka bisa dilihat dan diukur bagaimana bentuk terapan kegiatan, proses kinerja dan faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi dari bagaimana kinerja Yonmarhanlan XI Merauke di wilayah ujung timur dengan rentan konflik HAM dan ideologi memiliki tantangan yang tidak mudah dimana eksistensi kinerja untuk mempertahankan keamanan negara di sorot dan dinilai oleh khalayak orang banyak khususnya masyarakat Merauke. Dalam menanamkan wawasan berkebangsaan dan cinta tanah air tidak mudah dilakukan apalagi masih banyak masyarakat Merauke khususnya orang asli papua(OAP) memiliki sumber daya yang masih rendah dan masih banyak dari mereka yang belum siap menghadapi modernisasi.

Yang menjadi salah satu potensi perairan maritim yang sampai hingga saat ini menjadi permasalahan nyata dihadapi oleh TNI AL salah satunya sumber daya perikanan yang memiliki keanekaragaman hayati yang menjadi munculnya praktek ilegal fishing diperairan Arafura. Nilai jual sumber daya ikan yang memiliki angka yang fantastis menjadi incaran kapal – kapal asing yang melakukan perdagangan ilegal melalui pintu masuk perairan Torasi, Kumbe, Kondo, Waan. Selain itu praktik kegiatan pencurian ikan serta penyelundupan senjata ilegal dan juga obat – obatan terlarang.

Kapal – kapal ilegal yang masuk dijalur lintas batas perairan wilayah Merauke dan Papua Nugini memalsukan surat – surat perijinan agar bisa dapat melakukan aktivitas di wilayah perairan Merauke. Pada Maret 2022, jajaran Lantamal XI beserta Karantina Pertabian melakukan pemusnahan teripang ilegal sebanyak 131 kg. Teripang ini diduga merupakan penyelundupan dari Papua Nugini ke Merauke.

Tugas pokok dari Yonmarhanlan sendiri yaitu menyelenggarakan pertahanan daerah di wilayah Pangkalan Utama TNI AL dan melaksanakan tugas – tugas lain dalam mendukung tugas lantamal. Di dalam kegiatannya untuk mendukung dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI, di mana kabupaten Merauke yang berada di provinsi papua sendiri masuk ke dalam daerah rawan konflik dan menjadi *border line* negara Indonesia maka pendekatan yang dilakukan oleh Yonmarhanlan XI Merauke guna terwujudnya stabilitas nasional negara sesuai dengan Binpotmar yang berada di bawah naungan Lantamal XI Merauke antara lain salah satunya dengan adanya tiga program yang menjadi prioritas antara lain ketahanan pangan, operasi bhakti kesehatan, dan pembinaan pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk program nyata pembinaan pemberdayaan masyarakat serta dalam membangun komunikasi yang aktif sehingga membantu tugas dan fungsi TNI AL khususnya Yonmarhanlan XI.

Pada dasarnya eksistensi TNI AL khususnya Marinir belum banyak diketahui oleh masyarakat luas, padahal marinir merupakan pasukan khusus yang memiliki keistimewaan karena bukan hanya maritim saja yang bisa mereka jangkau melainkan wilayah daratan pun menjadi fokus sebagai pengaman pulau terluar, yang masuk sebagai pembinaan ketahanan wilayah maritim yang meliputi kemampuan teritorial sebagai kekuatan wilayah dimana operasi yang dilakukan membantu mengatasi masalah dan mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengakselerasi pembangunan daerah sebagai bentuk mempertahankan dan menjaga kedaulatan, serta keutuhan NKRI.

Untuk mendukung peforma dan memenuhi tujuan tugas pokok dan fungsi yang diemban pembinaan potensi maritim juga dilakukan oleh POSAL yang tersebar di seluruh wilayah Merauke. Posal – posal yang tersebar berfungsi menjaga keamanan melalui garis terluar sebagai pintu masuknya kegiatan kapal asing dan perdagangan ilegal.

Perbedaan pembinaan potensi maritim diwilayah perbatasan dan non – perbatasan adalah di wilayah perbatasan dengan daerah yang memiliki tingkat

konflik yang intens dan kompleks, penguatan yang dilakukan oleh TNI AL menitikberatkan melakukan pembinaan dan pemberdayaan secara menyeluruh kepada masyarakat sekitar dengan pendekatan yang humanis yang merangkul seluruh lapisan masyarakat serta membangun komunikasi dan kerja sama yang baik dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan, keterampilan dan terlibat dalam bersama – sama serta mendukung kegiatan bermasyarakat. Di wilayah non perbatasan pembinaan potensi maritim yang dilakukan menitik beratkan membantu pemerintah dengan mengatasi masalah – masalah yang ada wilayah tersebut dalam bentuk program safari dawilhanla, operasi survei hidro – oseanografi, proyeksi kekuatan laut ke darat melalui tugas dan fungsi KRI melakukan patroli secara rutin dan pelatihan – pelatihan yang menanamkan wawasan cinta NKRI melalui BJRB dan lain sebagainya.

Dengan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul Kinerja Yonmarhanlan XI dalam Pembinaan Potensi Maritim di Kabupaten Merauke Provinsi Papua.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja Yonmarhanlan XI dalam pembinaan potensi maritim di Kabupaten Merauke Provinsi Papua ?
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Yonmarhanlan XI di Kabupaten Merauke Provinsi Papua dalam pembinaan potensi maritim ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan kinerja dan eksistensi Yonmarhanlan XI Merauke dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam pembinaan teritorial kemaritiman dan pengamanan pulau terluar di ujung timur Indonesia.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Yonmarhanlan XI Merauke dalam mempertahankan kedaulatan negara di era globalisasi dan pada wilayah pembinaan rawan konflik.

1.4 Sasaran

Penelitian ini dilaksanakan agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain :

1. Bagi Penulis

- a. Penelitian yang dilakukan di harapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru khususnya untuk dapat mengenal lebih dekat bagaimana komponen pertahanan kedaulatan negara yang di tugaskan di daerah rawan konflik mampu mengatasi ancaman – ancaman nyata dan tidak nyata yang terjadi pada masyarakat.
- b. Sebagai salah satu sumber referensi untuk kepentingan ilmuan tentang potensi maritim, demografis penduduk, dan kebudayaan yang mana nantinya akan membantu penulis sebagai sarjana administrasi publik dalam menerapkan ilmu serta pengetahuan yang didapat untuk mengatasi masalah publik sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan.

2. Bagi Lembaga / Dinas

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk dijadikan referensi dan sumbangan pemikiran bagi Yonmarhanlan XI Merauke berkaitan dengan kinerja dan perannya untuk masyarakat secara luas dan pelayanan, serta upaya dalam menjaga kedaulatan NKRI dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.

3. Bagi Masyarakat

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk di pelajari sebagai pengetahuan dan wawasan.
- b. Masyarakat mengetahui secara real eksistensi dan peran TNI AL khususnya Marinir TNI AL dalam kontribusinya dalam pembangunan nasional dan pertahanan keamanan kedaulatan negara dalam menanamkan wawasan berkebangsaan di seluruh penjuru nusantara.

- c. Dapat dijadikan penelitian yang sama pada obyek dan lingkup penelitian yang berbeda sehingga dapat mengembangkan dan memajukan ilmu yang diteliti.